



**Makna Moderasi Beragama dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan**

Wisnu Hatami<sup>✉1</sup>, Muhamad Haikal Palkih<sup>✉2</sup>

<p><b>Informasi artikel</b>                  Sejarah Artikel :                  Diterima Mei 2024                  Revisi Juni 2024                  Dipublikasikan Juli 2024</p>	<p><b>ABSTRAK</b>                  Konsep moderasi beragama masih mencari titik temu untuk menjadi gagasan yang sangat matang. Terlebih di Indonesia dengan kondisi keanekaragaman budaya dan juga terdapat beberapa agama di dalamnya, moderasi beragama merupakan suatu keharusan. Sebagai negara yang memiliki perbedaan-perbedaan tersebut, masih ditemukan masalah sosial seperti konflik antar suku dan budaya di masyarakat, adanya diskriminasi maupun masalah sosial lainnya. Maka, pendidikan damai dan moderasi beragama muncul untuk meredam potensi-potensi negatif. Artikel ini bertujuan untuk mengkonstruksi makna moderasi beragama dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Partisipan dalam kegiatan ini adalah para guru Pendidikan kewarganegaraan di lingkungan SMA dan MA di Kabupaten Cirebon. Data penelitian diambil pada Januari sampai April 2024 menggunakan wawancara, observasi dan literatur. Data dianalisis menggunakan reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pendidikan damai dan moderasi beragama di Indonesia memang dibutuhkan. Hal ini karena Indonesia memang memiliki berbagai kondisi yang membuat masyarakat perlu untuk menjadi moderat, paham pencegahan konflik dan juga paham akan resolusi konflik. Dengan begitu, Indonesia akan tetap menjadi negara multikultur yang memiliki begitu banyak perbedaan latar belakang budaya, agama dan juga bahasa. (2) Baik itu pendidikan damai, pendidikan kewarganegaraan maupun moderasi beragama sebetulnya memiliki tujuan yang sama dalam mengembangkan aspek kognitif, afektif dan skill.</p>
<p><b>Keywords :</b>                  Moderasi beragama                  Pendidikan                  Kewarganegaraan</p>	<p><b>ABSTRACT</b>  <i>The Meaning of Religious Moderation in the Perspective of Citizenship Education.</i>                  The concept of religious moderation is still looking for a point to become a very mature idea. Especially in Indonesia with its cultural diversity and several religions, religious moderation is a must. As a country that has these differences, there are still social problems such as conflicts between ethnicities and cultures in society, discrimination and other social problems. So, religious moderation emerged to reduce negative potentials. This article aims to construct the meaning religious moderation in the perspective of civic education. The participants in this activity were civic education teachers in high schools and MAs in Cirebon City. The research data was collected from January to April 2024 using interviews, observations and literature. Data were analyzed using data reduction, data display and conclusion making. The results showed that (1) peace education and religious moderation in Indonesia are indeed needed. This is because Indonesia does have various conditions that make people need to be moderate, understand conflict prevention and also understand conflict resolution. That way, Indonesia will remain a multicultural country that has so many different cultural, religious and linguistic backgrounds. (2) Both peace education, civic education and religious moderation actually have the same goal in developing cognitive, affective and skill aspects.</p>
<p><b>How to Cite :</b>                  Hatami, W., Palkih, M.H. (2024). Makna Moderasi Beragama dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i>, 9(2), pp. 103-112. DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v9.n2.2024.pp103-112">http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v9.n2.2024.pp103-112</a></p>	<p><b>ABSTRACT</b>  <i>The Meaning of Religious Moderation in the Perspective of Citizenship Education.</i>                  The concept of religious moderation is still looking for a point to become a very mature idea. Especially in Indonesia with its cultural diversity and several religions, religious moderation is a must. As a country that has these differences, there are still social problems such as conflicts between ethnicities and cultures in society, discrimination and other social problems. So, religious moderation emerged to reduce negative potentials. This article aims to construct the meaning religious moderation in the perspective of civic education. The participants in this activity were civic education teachers in high schools and MAs in Cirebon City. The research data was collected from January to April 2024 using interviews, observations and literature. Data were analyzed using data reduction, data display and conclusion making. The results showed that (1) peace education and religious moderation in Indonesia are indeed needed. This is because Indonesia does have various conditions that make people need to be moderate, understand conflict prevention and also understand conflict resolution. That way, Indonesia will remain a multicultural country that has so many different cultural, religious and linguistic backgrounds. (2) Both peace education, civic education and religious moderation actually have the same goal in developing cognitive, affective and skill aspects.</p>
<p><b>✉ Alamat korespondensi:</b>                  IAIN Syekh Nurjati Cirebon<sup>1</sup>, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Tadris IPS, Kota Cirebon, Indonesia  <b>✉ E-mail:</b>  <a href="mailto:wisnuhatami@syekhnurjati.ac.id">wisnuhatami@syekhnurjati.ac.id</a><sup>1</sup>; <a href="mailto:haykalmuhamad999@gmail.com">haykalmuhamad999@gmail.com</a><sup>2</sup></p>	

Copyright © 2024 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

**PENDAHULUAN**

Sebagai negara yang terdiri dari berbagai agama, suku bangsa dan budaya, negara

Indonesia memiliki corak unik yang membuat negara Indonesia menjadi negara dengan ciri multicultural. Sebagai negara yang memiliki

perbedaan-perbedaan tersebut, masih ditemukan hal yang terkait dengan masalah sosial seperti konflik antar suku dan budaya di masyarakat, adanya diskriminasi maupun masalah sosial lainnya. Oleh sebab itu, Pendidikan damai dan moderasi beragama muncul untuk meredakan potensi-potensi negatif ini. Konsep moderasi beragama memang masih mencari titik temu untuk menjadi gagasan yang sangat matang. Terlebih di Indonesia, negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan juga terdapat beberapa agama di dalamnya, tentu moderasi beragama merupakan suatu keharusan. Snauwaert (Snauwaert, 2020) yang mengatakan bahwa pada negara yang memiliki system demokrasi, Pendidikan damai sangat penting diajarkan karena memang menciptakan rasa damai sendiri merupakan kewajiban negara juga warga negara. Oleh karena itu, Pendidikan damai dan moderasi beragama sangat penting kehadirannya.

Sebagai sebuah cara pandang, moderasi beragama merupakan konsep yang sangat cocok bagi negara yang majemuk seperti Indonesia. Moderasi beragama hadir untuk menghindari sikap-sikap berlebihan. “Sikap berlebihan dan ekstremitas dalam beragama ini meliputi berbagai bidang, baik akidah, hubungan antarkelompok, maupun politik” (Ismail dkk., 2021). Moderasi beragama juga sangat penting ditanamkan pada kalangan pelajar sebagai warga negara muda. Di Agama Islam, ada 4 pilar moderasi beragama seperti keadilan, keseimbangan, toleransi, dan juga wasathiyah. Melalui kegiatan dimbingan dan pembelajaran, anak didik diharapkan dapat menerapkan ajaran pokok Agama Islam. Utamanya hal yang berkaitan dengan toleransi di sekolah (Rusmayani, 2018). Setiap agama pasti memiliki nilai ajaran kasih di dalamnya. Agama Hindu memiliki konsep karma dan samsara, Agama Buddha memiliki prinsip Metta Paramita, dalam Agama Kristen disebut Hukum Kasih (Suratman & Pakpahan, 2021).

Ada sejumlah alasan yang mendasari mengapa penelitian ini menarik untuk dilakukan. *Pertama*, Pancasila sebagai alasan pencuatnya moderasi beragama merupakan hal yang melekat dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Namun dalam praktiknya, Pendidikan Kewarganegaraan tidak mendapat porsi yang cukup banyak dalam pembahasannya. *Kedua*, belum adanya penelitian yang membahas tentang kaitan Pendidikan damai, moderasi beragama dan Pendidikan kewarganegaraan secara

komprehensif. *Ketiga*, negara rawan konflik seperti Indonesia perlu adanya pemahaman tentang damai dan toleransi. Di negara rawan konflik seperti Kuwait pun, penanaman nilai toleransi sangat penting agar tidak terjadi gesekan yang berkepanjangan (Alabdulhadi, 2019). *Keempat*, konflik antar umat beragama seringkali menimbulkan bencana kemanusiaan (Akhmadi, 2019). *Kelima*, moderasi beragama dan Pendidikan damai memiliki tujuan membuat warga negara menjadi lebih baik. Hal ini tentu kurang lebih sama dengan tujuan adanya Pendidikan kewarganegaraan. Keenam, beberapa penelitian sebelumnya pernah mengaitkan antara pendidikan kewarganegaraan dan moderasi beragama (Norhidayah, 2022), namun penelitian ini menemukan suatu perspektif dari para guru yang mengajar langsung di sekolah. Tentu ini merupakan hal baru yang dapat memperkaya kajian moderasi beragama.

Apabila ditinjau dari segi urgensinya, pendidikan kewarganegaraan maupun moderasi beragama sama-sama memiliki tujuan untuk menjadikan warga negara memiliki rasa toleransi yang tinggi, saling menghargai, saling menghormati dan saling tolong menolong menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Sebagai negara demokratis, tentu Indonesia membutuhkan ketiga konsep ini untuk membuat perbedaan-perbedaan suku, agama, ras dan budaya tidak menjadi sebagai ancaman atau potensi konflik. Perbedaan-perbedaan tersebut tentu dapat menjadi potensi yang membuat negara Indonesia menjadi negara yang kaya akan budaya, suku dan pemikiran atau gagasan yang membuat kehidupan menjadi lebih baik.

Bahwa pendidikan Kewarganegaraan didesain sebagai upaya untuk mempersiapkan diri dan juga upaya penyesuaian diri terhadap perubahan nilai dimasa yang akan mendatang baik perubahan yang ada didalam lingkungan sendiri maupun perubahan dari luar negeri, terutama yang berkaitan isu-isu Globalisasi. (Mahifal & MH, 2011). Di era ini, tugas Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma yang barunya yaitu mengembankan pendidikan demokrasi mengembankan tiga fungsi pokok, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic knowledge*), membina keterampilan warga negara (*civic skill*) dan membentuk watak warga negara (*civic disposition*). Kecerdasan warga negara yang dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik bukan hanya dalam dimensi rasional,

melainkan juga dalam dimensi spiritual, emosional, dan sosial sehingga paradigma baru pendidikan kewarganegaraan bercirikan multidimensional (Kusnawi Basyir, 2013). Di masyarakat, masih adanya konflik antarsuku dan antarbudaya (Dwi Hapsari W, 2017), serta tindakan diskriminatif dan persoalan sosial lainnya yang terjadi. Kasus konflik terkait keberagaman dikutip dari Kompas.com sebanyak 2.398 kasus sejak 1999 hingga 2020. Maka, menarik untuk melihat bagaimana moderasi beragama dalam perspektif Pendidikan kewarganegaraan. Terlebih lagi, Pendidikan kewarganegaraan dapat berperan menjadi resolusi konflik social di masyarakat (Sutrisno, Sapriya, Komalasari, & Rahmat, 2021).

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Fenomenologi diambil dengan mempertimbangkan beberapa hal. *Pertama*, data yang dicari merupakan sebuah konstruksi makna. Kontruksi makna tentu berkaitan dengan pengalamannya dalam pandangan mereka sendiri. *Kedua*, metode fenomenologi dapat menjadi metode yang pas dalam mengkontruksi terkait dengan pengalaman informan. *Ketiga*, setiap orang akan melihat realita secara berbeda, oleh sebab itu fenomenologi menekankan pada makna dari pengalaman masing-masing individu. Tempat penelitian ini adalah sekolah-sekolah baik itu SMA maupun Madrasah Aliyah yang ada di Kabupaten Cirebon. Pengumpulan data diambil melalui data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari wawancara dengan para guru pendidikan kewarganegaraan di jenjang SMA/MA Kabupaten Cirebon sebagai subjek penelitian sebanyak 8 orang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan studi kepustakaan dari pendapat para pakar di bidang pendidikan kewarganegaraan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Langkah-langkah ini dilakukan dalam upaya mencari serta menyusun secara sistematis dari data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dalam analisis data fenomenologis, peneliti melakukan tahap awal yaitu mendeskripsikan fenomena yang dialami informan, selanjutnya tahap *horizontalization* yaitu mengumpulkan pernyataan yang sesuai dengan topik, yang ketiga yaitu *cluster of meaning* artinya pernyataan informan dikelompokkan ke dalam

unit-unit makna. Sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi dan *member check*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan melihat karakter Indonesia yang multikultural, kehidupan umat beragama harus terjaga dan kerukunan harus tetap berjalan. Bangsa ini tentu harus bisa hidup saling bergotong royong meskipun berbeda keyakinan. Maka peran moderasi beragama diperlukan dalam bernegara sangat diperlukan. Masyarakat perlu memiliki pandangan bahwa sebuah agama dengan cara pandang, sikap, juga praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mewujudkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bernegara. Hal ini senada dengan temuan penelitian yang dikatakan responden DL bahwa “moderasi beragama adalah di mana kita memaknai hidup beragama sebagaimana esensinya, terkadang kita sebagai manusia yang beragama tidak lepas dari pelanggaran atau pengingkaran terhadap nilai-nilai agama itu sendiri, sehingga banyak sekali orang yang mengaku beragama tapi secara sikap atau perilaku masih jauh dari agama itu sendiri”. Selanjutnya peneliti menemukan makna moderasi beragama Menurut K dimana pada hakikatnya sama dengan sila ke-1 pancasila “Ketuhanan yang Maha Esa”. Sebab, intinya adalah bagaimana sikap dan praktik beragama dalam kehidupan yang beragam agama dan lainnya tentulah sangat penting baik diterapkan di sekolah maupun di masyarakat “.

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa moderasi beragama berarti bersikap moderat atau jalan tengah dalam melakukan praktik beragama tanpa terlalu fanatik atas agamanya masing-masing dan menghargai agama orang lain yang berada di lingkungan sekitar kita. Selain itu, moderasi beragama juga sangat perlu diterapkan di Indonesia karena dengan kondisi beragamnya suku dan budaya. Tentunya dengan batasan yang jelas disesuaikan dengan aturan agamanya masing-masing tanpa menghilangkan unsur keagamaan yang dianutnya.

Selanjutnya peneliti menemukan beberapa nilai yang harus terkandung dalam moderasi beragama. Beberapa diantaranya menurut DL yaitu saling menghargai. Sebagai bangsa Indonesia kita harus menerima segala bentuk perbedaan yang terjadi. Kemudian, tidak

memaksakan kebenaran berdasarkan keyakinan satu agama, membiasakan toleransi, saling menjaga satu sama lain, melindungi yang lemah, saling bergotong-royong, dan menaati konstitusi. Hal ini diperkuat oleh pendapat SS yang mengatakan “Nilai-nilai yang harus terkandung dalam moderasi beragama menurut saya harus menanamkan lagi nilai Pancasila, dimana Ketuhanan adalah nomor satu. Dalam artian untuk melaksanakan moderasi, individu harus mempunyai keyakinan dan keimanan yang kuat terlebih dahulu terhadap agamanya”.

Selanjutnya dari beberapa pernyataan di atas muncul pertanyaan perlukah moderasi diterapkan di Indonesia? Terutama dalam lingkup pendidikan formal maupun non-formal. Berdasarkan temuan penelitian, DL mengungkapkan bahwa Moderasi beragama tentulah sangat penting baik diterapkan di sekolah maupun di masyarakat. Seperti yang sudah diketahui bahwa moderasi beragama ini adalah mempraktikkan agama sesuai esensinya sebagai umat beragama. Bangsa Indonesia harus melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Inti dari sila pertama ketuhanan yang maha esa adalah menjunjung tinggi martabat manusia sebagai sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Tuhan. Hal ini diperkuat dengan pendapat SS yang mengatakan bahwa “perlu tapi tentunya dengan batasan yang jelas disesuaikan dengan aturan agamanya masing masing tanpa menghilangkan unsur keagamaan yang dianutnya. Karena saya percaya bahwa setiap agama pasti selalu mengajarkan kebaikan dan menghargai setiap perbedaan agama yang ada dilingkungan sekitar kita”.

Selanjutnya dengan melihat beberapa fenomena yang telah dipaparkan subjek penelitian. Bahwa moderasi bergama sangat diperlukan didalam lingkungan pendidikan terutama muatan dalam pendidikan kewarganegaraan dalam hal ini pendidikan kewarganegaraan berupaya menjaga moderasi beragama dengan beberapa cara menurut DL dan diperkuat oleh K menuturkan Beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pendidikan kewarganegaraan dalam menjaga moderasi warga negara diantaranya adalah membiasakan toleransi dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bergotong-royong. Contoh dalam hal kecil adalah bergotong-royong dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah atau kebersihan kelas. Kemudian bisa juga dengan cara membiasakan kegiatan spiritual,

yaitu berdoa sebelum melaksanakan pelajaran sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sedangkan toleransi contohnya menghargai setiap perayaan hari raya agama yang ada Indonesia.

Selain itu juga temuan penelitian menemukan bahwa menurut BS bahwa pendidikan kewarganegaraan dalam menjaga moderasi beragama perlu untuk menyesuaikan konten pembelajaran agar kontekstual dengan tantangan kehidupan beragama di Indonesia. Walaupun Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia adalah negara beragama. Hal itu harus menjadi perhatian serius oleh para akademisi pendidikan kewarganegaraan. Kemudian siswa juga dalam mengikuti mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan perlu untuk membiasakan diri dalam bekerjasama ketika memecahkan masalah dengan studi kasus. Selain itu pendidikan kewarganegaraan juga harus mengimplementasikan pandangan bahwasanya perubahan sikap siswa jauh lebih penting dibanding tingginya nilai kognitif

Seperti yang sudah diketahui bahwa moderasi beragama ini adalah mempraktikkan ajaran agama sesuai esensinya sebagai umat beragama. Maka Negara Indonesia harus melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Bahwa inti dari sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa adalah menjunjung tinggi atau martabat manusia sebagai sebagai bentuk manifestasi kecintaan kita terhadap Tuhan karena bagaimanapun manusia juga ciptaan Tuhan

Dari beberapa pernyataan sebelumnya, peneliti menemukan konsep moderasi beragama memiliki makna untuk saling toleransi, saling menghargai dan tidak terlalu fanatik akan agamanya masing-masing. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya kan suku bangsa dan agama maka setiap warga yang ada di dalamnya harus menghargai dan hidup rukun antar sesama bagaimana menjadi warga negara yang baik untuk kemajuan bangsa yang cerdas dan bermoral.

Selanjutnya BS berpendapat tentang upaya pengenalan moderasi beragama dapat dilakukan dengan beberapa hal seperti berikut: *Pertama*, pengenalan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual dan menarik. *Kedua*, mengajak peserta didik untuk berpikir luas dan terbuka. Bahwa pemahaman agama tak hanya satu seperti yang diajarkan oleh orang tua atau guru ngajinya saja, tapi juga banyak pemahaman agama

berbeda dari ulama yang dapat dipertanggungjawabkan juga kredibilitasnya. *Ketiga*, di era media sosial seperti sekarang, perlu untuk menjaga etika bermedia sosial. Tidak menyebar hoaks dan tidak menyebar ujaran kebencian merupakan salah satu bentuk kontribusi menciptakan kedamaian. Selanjutnya pendapat lain dikemukakan oleh K yakni menurutnya upaya pengenalan moderasi beragama dapat dilakukan dengan memberikan contoh sikap terhadap siswa yang berbeda agama yaitu selalu bersikap toleran dan tidak membeda-bedakan agamanya. Selain itu siswa dapat dibelajarkan untuk mempunyai pemikiran kritis dan peka terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Sehingga nantinya siswa tersebut bisa memberikan solusi dari permasalahan yang ada karena kemampuan ini merupakan bekal untuknya di lingkungan yang sebenarnya yang heterogen dan beragam karakternya. Hal ini tentu sangat menarik untuk dibahas mengingat di setiap sekolah tentu berbeda tantangan dan situasi juga cara guru dalam mengupayakan pengenalan moderasi beragama dengan perbedaan yang ada.

Pancasila dan agama merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Keduanya menjadi suatu hal yang disepakati bersama bahwa Pancasila sebagai dasar atau ideologi bersama dan agama berarti setiap warga negara Indonesia berhak memeluk agamanya masing-masing. Moderasi beragama merupakan cara pikir moderat atau mengambil jalan tengah dan salah satu bentuk dari sikap toleransi yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karakter atau ciri khas Islam di Indonesia adalah moderasi, yang dalam bahasa Qur’ani disebut *wasathiyah*. (Lessy dkk., 2022). Secara etimologi, kata “*wasath*” berarti adil, pilihan, dan pertengahan. Oleh sebab itu *wasath* dapat diartikan menjadi posisi tengah atau di tengah. Maka, *wasathiyah* berarti menjaga keseimbangan diantara dua kubu.

Di Indonesia sendiri moderasi beragama dalam perspektif Islam mengedepankan cara dialog dan berdiskusi guna menghargai perbedaan pendapat. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, manusia pasti membutuhkan manusia lain. Sikap saling membutuhkan ini merupakan modal untuk saling berinteraksi dengan kelompok lain. Fakta ini yang seharusnya menjadi patokan oleh semua golongan untuk selalu menjaga rasa damai, tentram dan dipenuhi oleh rasa saling

menghargai sesama manusia agar terciptanya kehidupan yang baik dan juga harmoni.

Akhir-akhir ini kajian tentang moderasi beragama kembali muncul. Hal ini terjadi karena beberapa peristiwa konflik yang dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan agama. Maka, kajian tentang moderasi beragama dipandang perlu untuk kembali dijadikan sebagai arus utama di masyarakat agar kedamaian kembali terwujud dan kondisi sosial masyarakat menjadi kondusif. Selain itu, kajian tentang moderasi beragama yang berangkat seharusnya berangkat dari nilai-nilai Pancasila ini seakan kurang menempatkan Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu alat kajiannya. Padahal, Pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan merupakan hal yang sangat berkaitan. Untuk itu, menarik untuk melihat bagaimana pendidikan kewarganegaraan memandang tentang moderasi beragama seperti berikut:

Tabel 1. Pendapat subjek penelitian tentang makna moderasi beragama

Subjek penelitian	Pernyataan
D	Moderasi beragama adalah di mana kita memaknai hidup beragama sebagaimana esensinya
K	Moderasi beragama hakikatnya sama dengan sila 1 pancasila “Ketuhanan yang Maha Esa”. Sebab, intinya adalah bagaimana sikap dan praktik beragama dalam kehidupan yang beragam agama dan lainnya
SK	Cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan berlandaskan prinsip adil, berimbang dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bernegara
SS	Menjunjung nilai toleransi dalam beragama. Sudah hampir mencapai toleransi keablasan, sehingga banyak nilai nilai agama yang dilanggar atas nama toleransi

BS Bagi saya bermakna dua hal. Pertama, umat beragama tidak melulu mengagungkan simbol sebagai sebuah rukun beragama. Kedua, moderasi beragama bermakna bahwa dengan beragama tak hanya menuntun kita meraih kesalehan ritual, tapi juga kesalehan sosial. Orang yang soleh secara sosial pasti akan membawa dampak baik bagi lingkungan masyarakatnya sehingga konflik antar umat satu agama atau berbeda agama misalkan, akan terhindarkan.

Dari tabel 1 dapat diperhatikan bahwa moderasi beragama dapat dilihat sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan esensi ajaran agama masing-masing berlandaskan prinsip adil, berimbang dan toleran. Dapat juga dilihat sebagai ajaran yang berkaitan dengan nilai toleransi dan juga saling menghargai. Moderasi beragama dapat juga dimaknai bahwa dengan beragama bukan hanya akan menuntun kita meraih kesalehan ritual, tapi juga menjadi saleh secara sosial. Karena orang yang soleh secara sosial pasti akan membawa dampak yang baik bagi lingkungannya.

Dalam penelitian ini didapatkan beberapa gambaran mengenai moderasi beragama di Indonesia. *Pertama*, moderasi beragama berarti sikap moderat atau jalan tengah dalam melakukan praktik beragama dan menghargai agama orang lain dengan batasan yang jelas dengan aturan agama masing-masing tanpa menghilangkan unsur keagamaan yang dianutnya. Dengan memperhatikan pernyataan-pernyataan dari subjek penelitian, terlihat bahwa moderasi beragama muncul agar tidak terjadinya sikap saling fanatik antar agama yang justru dapat menimbulkan potensi konflik antar agama.

Moderasi beragama mengajak untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing tanpa harus merasa terancam. Prinsip moderasi beragama sendiri tercermin pada nilai Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa (Indarwati, Sulton, & J.M., 2022). Artinya, setiap orang berhak untuk memilih dan menjalankan ibadah dari ajaran agamanya masing-masing. Saifudin dalam pendapatnya mengatakan bahwa moderasi beragama berarti sikap memahami dan juga mengamalkan ajaran agamanya secara adil dan juga seimbang agar menghindari perilaku

yang berlebihan dalam pelaksanaannya (Agama, 201M)

Menurut (Ismail dkk., 2021), moderasi sendiri merupakan nilai kebaikan untuk memotivasi terbentuknya harmoni di bidang sosial politik dan juga terciptanya keseimbangan antara kehidupan pribadi, keluarga, dan juga masyarakat. Moderasi ini sebagai Islam wasathiyah yaitu menghindari perilaku yang berlebihan seperti eksklusif dan juga ekstrim (Abror Mhd., 2020). Bagi Nasrudin Umar, moderasi beragama merupakan sikap untuk hidup dalam keberagaman agama dan juga berdampingan secara sosial politik. Sedangkan moderasi dapat dimaknai sebagai pemahaman sikap terpuji pada ajaran yang lurus, tidak lebih dan kurang dalam berpikir dan juga bertindak berperilaku sehingga tidak bersikap ekstrim (Hasan, 2021). Dengan sikap moderat seperti ini, diharapkan dapat terciptanya sikap toleran terhadap perbedaan, bersikap inklusif, terbuka dengan golongan lain sehingga terciptanya kondisi yang damai dan penuh rahmat. (Adya Winata, Solihin, Ruswandi, & Erihadiana, 2020). Selain itu, adanya sikap moderat akan membuat warga negara tidak perlu merasa terkotak-kotakkan dari eksklusivitas berbagai golongan.

*Kedua*, moderasi beragama di Indonesia belum terlaksana secara maksimal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa subjek penelitian belum merasakan moderasi beragama secara optimal dan masih banyak yang harus dibahas agar moderasi beragama ini dapat dijalankan secara baik. Misalnya saja, dalam lingkup Islam sendiri masih harus bisa menghargai perbedaan yang ada di kalangan internal, banyak ustadz yang mengkampanyekan agar tidak perlu ribut meskipun berbeda organisasi keagamaannya. Ada pula yang mengatakan bahwa masih memerlukan banyak bimbingan dan juga adanya kedewasaan untuk saling mengerti dan memahami bahwa negara Indonesia adalah negara dengan keberagaman. Kemudian, moderasi beragama masih mudah sekali direcoki oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa apabila yang dimaksud moderasi beragama adalah kondisi untuk saling menghargai dan menjunjung tinggi toleransi tentu sangat diperlukan keberadaannya di Indonesia (Abror Mhd., 2020). Namun, moderasi beragama ini harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sebagai bentuk manifestasi kecintaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa. Moderasi beragama juga perlu ada batasan yang jelas disesuaikan dengan aturan dalam masing-masing agama. Terkait dengan nilai-nilai yang seharusnya terkandung dalam moderasi beragama, temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai saling menghargai, toleransi, gotong royong, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai Pancasila adalah hal yang menjadi kajian utama. Jadi sebetulnya, ketika warga negara tersebut sudah menjalankan nilai Pancasila dan juga nilai dalam ajaran agamanya, warga negara tersebut sudah menjalankan nilai-nilai moderasi beragama.

Menurut (Winata, Sudrajat, Yuniarsih, & Zaqiah, 2020) terdapat lima hal yang dapat menjadi prinsip dalam moderasi beragama yaitu pertama keadilan, adil ini artinya adanya perilaku seimbang dengan menjunjung tinggi hak semua orang dalam semua aspek. Kedua, prinsip toleransi, artinya saling memberikan rasa aman dan juga saling menghormati adanya perbedaan karena perbedaan adalah kehendak Tuhan. Ketiga, prinsip keseimbangan, artinya menghindari sikap-sikap yang berlebihan. Prinsip keempat yaitu keberagaman dimana bentuk multikultural yang ada perlu untuk menghargai keberadaan pihak lain, tidak memahsa dan juga menghargai perbedaan pendapat. Sedangkan prinsip kelima yaitu keteladanan yang artinya perlu adanya sikap teladan agar siswa dapat mencontoh perilaku moderat. Hal senada diungkap (Lessy dkk., 2022) yang mengatakan bahwa ada tiga upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam mengenalkan moderasi beragama. Pertama, mengembangkan nilai budaya di sekolah seperti nilai kejujuran, saling menghormati, sopan santun sebagai pedoman perilaku siswa. Kedua, mengembangkan rasa saling mengerti antar siswa yang berbeda keyakinan agamanya. Perlu adanya dialog antar siswa yang berbeda agama agar siswa terbiasa berdialog dengan siswa yang berbeda keyakinan agamanya. *Ketiga*, buku teks yang digunakan harus memuat nilai bhineka tunggal ika dan toleransi beragama.

Kemudian, beberapa cara yang dapat dilakukan Pendidikan kewarganegaraan dalam menjaga moderasi adalah *pertama*, membiasakan Toleransi dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari dan bergotong-royong. Contoh dalam hal kecil adalah bergotong-royong dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah atau kebersihan kelas. Sedangkan Toleransi contohnya menghargai setiap perayaan hari raya agama yang ada

Indonesia *Kedua* bisa juga dengan cara membiasakan kegiatan spiritual, dalam hal ini yaitu berdoa sebelum melaksanakan pelajaran sesuai dengan kepercayaan masing-masing. *Ketiga*, Menyesuaikan konten pembelajaran agar kontekstual dengan tantangan kehidupan beragama di Indonesia. Hal ini perlu untuk menjadi perhatian yang cukup serius bagi para akademisi mengingat fakta bahwa meskipun Indonesia bukan negara agama, Indonesia adalah negara beragama. Keempat, siswa dibiasakan untuk bekerjasama dalam memecahkan masalah kehidupan berbangsa dan bernegara dengan membentuk kelompok-kelompok belajar.

Selain moderasi beragama, pendidikan damai di sekolah juga dapat menjadi salah satu instrumen dalam konteks dunia pendidikan Indonesia pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan karena dapat menjadi wahana dalam pembinaan warga negara muda yang demokratis agar dapat menjadi agen-agen perdamaian di Indonesia yang rawan konflik. Ayat Al-Quran yang secara khusus membahas tentang perdamaian dan perang bisa dibagi ke dalam tiga kategori yaitu, pertama adalah visi preventif konflik kekerasan, kedua, mekanisme resolusi konflik dan ketiga adalah berdasarkan pola transformasi konflik (Ar, 2015).

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengenalkan moderasi beragama dalam pembelajaran di kelas dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti pertama, pengenalan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual dan menarik. Kedua, mengajak peserta didik untuk berpikir luas dan terbuka. Ketiga, di era media sosial seperti sekarang, perlu bagi peserta didik untuk menjaga etika bermedia sosial. Tidak menyebar hoaks dan tidak menyebar ujaran kebencian merupakan salah satu bentuk kontribusi menciptakan kedamaian. Keempat, dengan memberikan contoh sikap terhadap siswa yang berbeda agama salah satunya selalu bersikap toleransi dan tidak membeda-bedakan.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang penting untuk selalu berada pada landasan Pancasila sebagai landasan utama Pendidikan Indonesia (Hatami, 2020). Sebagai mata pelajaran yang menekankan pada aspek nilai moral, Pendidikan kewarganegaraan memiliki cita-cita mulia yaitu menjadikan warga negara Indonesia menjadi cerdas dan baik (*smart and good citizen*). Warga negara yang baik dapat tergambar sebagai warga negara yang memiliki toleransi tinggi, memiliki kepatuhan terhadap

hukum, hingga memiliki rasa setia terhadap negaranya.

Sebagai mata pelajaran yang berfokus pada pembentukan diri siswa yang beragam dari segi agama, budaya, Bahasa dan suku bangsa, Pendidikan kewarganegaraan hadir untuk mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar siswa lebih mengenalnya. Maka, pendekatan yang tepat akan membuat siswa menjadi lebih terlibat

Beberapa kiat untuk mengembangkan materi pembelajaran yang disajikan di kelas dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pertama, membuat media pembelajaran yang menarik, mengarahkan siswa untuk melakukan kerjasama dan berpikiran kritis terhadap permasalahan-permasalahan sosial, ajaklah siswa untuk menggali pengalaman-pengalaman mereka hidup bermasyarakat di luar sekolah. Kedua, selalu update berita terkini. Hal ini penting untuk mengaitkan materi dengan pembelajaran kontekstual. Ketiga, terus membaca dan belajar karena guru harus terus memperluas dan memperkaya perspektif ilmu pengetahuan. Dengan begitu, materi pembelajaran yang disajikan bisa terus relevan dan menarik.

Sebagai mata pelajaran yang juga mengembangkan nilai multikultural, pendidikan kewarganegaraan dapat berperan dalam menyiapkan warga negara muda yang demokratis serta berbagai nilai lainnya. Meskipun terdapat berbagai potensi disintegrasi bangsa dari keberagaman tersebut di dalamnya, Indonesia perlu untuk menjaga nilai multikultural tersebut menggunakan nilai-nilai pancasila dan bhineka tunggal ika sebagai pemersatu bangsa. Maka, moderasi beragama hadir untuk melengkapi kajian pendidikan kewarganegaraan yang sudah eksisting di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan dituntut untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan potensinya dalam berbagai nilai dan sikap sehingga dapat menjadi warga negara yang cerdas dan baik sehingga memiliki rasa damai dan moderat dalam dirinya.

Dapat dilihat bahwa moderasi beragama dan pendidikan kewarganegaraan sesungguhnya sangat berkaitan. Oleh sebab itu perlu adanya moderasi beragama menggunakan perspektif pendidikan kewarganegaraan karena moderasi beragama sangat berkaitan dengan warga negara dan memiliki tujuan yang sama dengan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan agama memiliki peran yang sangat penting

dalam menyampaikan kedamaian karena agama merupakan pedoman dalam bertindak dan berperilaku. (Atmanto, 2017). Sedangkan agama penuh dengan nilai karakter dan pendidikan kewarganegaraan pun dapat mengambil peran itu. Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia. Konstitusi ini ternyata tertuang tentang hal yang saat ini disebut tentang hak-hak sipil (*civil rights*), atau disebut juga hak asasi manusia (HAM). (Hurri & Munajat, 2016a). Ada dua nilai dasar yang tertuang dalam Piagam Madinah. (Hurri & Munajat, 2016b). *Pertama*, prinsip kesederajatan dan keadilan. *Kedua*, inklusivisme atau keterbukaan.

Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa di negara demokrasi, kemajuan teori dan praktek pendidikan perdamaian bergantung pada pengembangan landasan filosofis (Snauwaert, 2020). Maka dari itu, Pendidikan politik juga tidak kalah penting untuk meningkatkan rasa kewajiban warga negara terhadap perdamaian. Pendapat ini diperkuat oleh (Mardhiah, 2019) (Lombardo & Polonko, 2015) yang mengatakan bahwa pendidikan damai adalah kunci untuk membangun perdamaian konsensual dan memeliharanya dari waktu ke waktu

Baik itu pendidikan kewarganegaraan maupun moderasi beragama sebetulnya memiliki tujuan yang sama yaitu sama-sama ingin menjadikan warga negara muda sebagai warga negara yang demokratis. Moderasi Beragama dalam Perspektif Pendidikan kewarganegaraan itu secara konsep sama-sama mengajarkan nilai karakter. Maka setiap guru bisa mengajarkan atau membentuk karakter-karakter seperti toleransi, menghargai perbedaan, saling menolong, dan menghindari konflik. Guru bukan hanya sekedar media transfer ilmu saja melainkan juga mempunyai peran lain yaitu membentuk karakter siswa.

Sebagai mata pelajaran yang juga mengembangkan nilai multikultural, pendidikan kewarganegaraan dapat berperan dalam menyiapkan warga negara muda yang demokratis serta berbagai nilai lainnya. Meskipun terdapat berbagai potensi disintegrasi bangsa dari keberagaman tersebut di dalamnya, Indonesia perlu untuk menjaga nilai multikultural tersebut menggunakan nilai-nilai pancasila dan bhineka tunggal ika sebagai pemersatu bangsa. Maka, moderasi beragama hadir untuk melengkapi kajian pendidikan kewarganegaraan yang sudah eksisting di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan

dituntut untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan potensinya dalam berbagai nilai dan sikap sehingga dapat menjadi warga negara yang cerdas dan baik sehingga memiliki rasa damai, moderat dan toleran dalam dirinya.

### SIMPULAN

Moderasi beragama di Indonesia memang dibutuhkan. Hal ini karena Indonesia memang memiliki berbagai kondisi yang membuat masyarakat perlu untuk menjadi moderat, paham pencegahan konflik dan juga paham akan resolusi konflik. Dengan begitu, Indonesia akan tetap menjadi negara multikultur yang memiliki begitu banyak perbedaan latar belakang budaya, agama dan juga bahasa. Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, moderasi beragama adalah bagaimana menerapkan nilai Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan beragama dengan mengedepankan dialog mencari jalan tengah dengan menjunjung tinggi nilai toleransi.

Baik itu pendidikan damai, pendidikan kewarganegaraan maupun moderasi beragama sebetulnya memiliki tujuan yang sama dalam mengembangkan aspek kognitif, afektif dan skill. Aspek kognitif berupa pengetahuan tentang budaya, ras, gender, ham, agama, globalisasi, konflik dan perang serta pemahaman tentang damai. Aspek afektif berupa sikap toleransi, menghormati martabat manusia, menghargai perbedaan budaya, empati, peduli, tanggung jawab dan juga solidaritas. Sedangkan aspek skill berupa komunikasi yang efektif, berpikir kritis, kemampuan dalam pemecahan masalah.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. Penulis juga berterimakasih kepada para Guru Pendidikan Kewarganegaraan di Kabupaten Cirebon yang menjadi sumber informasi penulis dalam meneliti hal ini.

### DAFTAR PUSTAKA

Abror Mhd. (2020). Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi ( Kajian Islam dan Keberagaman ). *Rusydiah*, 1(1), 137–148.

Adya Winata, K., Solihin, I., Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2020). Moderasi Islam

Dalam Pembelajaran PAI Melalui Model Pembelajaran Konstektual. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 3(2), 82–92.

Agama, B. L. dan D. K. (201M). Tanya Jawab Moderasi Beragama. Dalam *Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*.

Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55.

Alabdulhadi, M. M. J. (2019). Religious tolerance in secondary Islamic Education textbooks in Kuwait. *British Journal of Religious Education*, 41(4), 422–434. <https://doi.org/10.1080/01416200.2019.1585329>

Ar, E. H. (2015). Pengarus Utama Pendidikan Damai (Peaceful Education) Dalam Pendidikan Agama Islam solusi ALternatif Upaya deradikalisasi Pandangan Agama). *At-Turats*, 9, 6–13.

Atmanto, N. E. (2017). Pendidikan Damai Melalui Pendidikan Agama Pada Sekolah Menengah Atas Di Daerah Pasca Konflik (Studi di SMA St. Fransiskus Asisi Bengkayang dan SMA Shalom Bengkayang). *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, 3(2), 155–168. <https://doi.org/10.18784/smart.v3i2.513>

Dwi Hapsari W, E. R. (2017). Manajemen Konflik Antarbudaya Pada Organisasi Internasional. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 11. <https://doi.org/10.14710/interaksi.6.2.11-19>

Hasan, M. (2021). Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa. *Jurnal Muftadiin*, 7(2), 111–123.

Hatami, W. (2020). *Anime Jepang Sebagai Sumber Pembelajaran Pkn. IX(2)*, 52–66.

Hurri, I., & Munajat, A. (2016a). *Pendidikan Kewarganegaraan Panduan untuk*

- Mahasiswa, Pendidik, dan Masyarakat Secara Umum.*
- Hurri, I., & Munajat, A. (2016b). *Pendidikan Kewarganegaraan Panduan untuk Mahasiswa, Pendidik, dan Masyarakat Secara Umum.*
- indarwati, sulton, sulton, & J.M, A. (2022). Moderasi Antar Umat Beragama dalam kajian Ilmu Kewarganegaraan. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 36–46.  
<https://doi.org/10.24269/jpk.v7.n2.2022.p36-46>
- Ismail, A. I., Nata, A., Bachmid, A., Lubis, A., Bakti, A. F., Arief, A., ... Zulkifli. (2021). Moderasi Beragama: Perspektif Antropologi Sosial Budaya. Dalam *Konstruksi Moderasi Beragama: Catatan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*
- Kusnawi Basyir. (2013). *Pancasila dan Kewarnegaraan.*
- Lessy, Z., Widiawati, A., Alif, D., Himawan, U., Alfiyaturrahmah, F., & Salsabila, K. (2022). Implementasi Moderasi Beragama Di Lingkungan Sekolah Dasar. *Paedagogie: Jurnal Pendidikan dan studi Islam*, 3(02), 137–148.
- Lombardo, L. X., & Polonko, K. A. (2015). Peace education and childhood. *Journal of Peace Education*, 12(2), 182–203.  
<https://doi.org/10.1080/17400201.2015.1046424>
- Mahifal, S., & MH. (2011). *Relevansi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam era globalisasi.* 1–15.
- Mardhiah, A. (2019). Proses Membangun Budaya Damai Melalui Pendidikan Islam (Kajian. *jurna intelektualita*, 7(2), 109–121.
- Norhidayah. (2022). Penerapan Moderasi Beragama dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. *JEID: Journal of Educational Integration and Development*, 2(3), 187–197.  
<https://doi.org/10.55868/jeid.v2i3.141>
- Rusmayani. (2018). Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Islam Siswa di Sekolah Umum. *Jurnal Penanaman Nilai Nilai Moderasi*, (April), 786–788.
- Snauwaert, D. T. (2020). The peace education imperative: a democratic rationale for peace education as a civic duty. *Journal of Peace Education*, 17(1), 48–60.  
<https://doi.org/10.1080/17400201.2020.1713068>
- Suratman, E., & Pakpahan, G. K. R. (2021). Moderasi Beragama dalam Perspektif Hukum Kasih. *prosiding pelita bangsa*, 1(2), 1–10.  
<https://doi.org/10.1177/1468795X17700645.8>
- Sutrisno, Sapriya, Komalasari, K., & Rahmat. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Global Sebagai Resolusi Konflik Sosial. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 25–34.  
<https://doi.org/10.24269/jpk.v6.n1.2021.p25-34>
- Winata, K. A., Sudrajat, T., Yuniarsih, Y., & Zaqiah, Q. Y. (2020). Peran Dosen dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Mendukung Program Moderasi Beragama. *Jurnal Pendidikan*, 8(2), 98–110.  
<https://doi.org/10.36232/pendidikan.v8i2.449>